

Rusia Usir Diplomat Swedia dan Jerman Karena Hadiri Demonstrasi Dukungan Navalny

MOSKOW (IM) - Pemerintah Rusia telah menyatakan seorang diplomat Swedia, Polandia, dan Jerman sebagai personae non gratae. Diplomat dari tiga negara itu diusir karena partisipasi mereka dalam unjuk rasa pada 23 Januari di Moskow dan St. Petersburg. Di mata Moskow, aksi demonstrasi yang digelar pendukung Navalny itu tidak sah.

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, diplomat dari ketiga negara itu telah melanggar Konvensi Wina 1961 soal hubungan diplomatik.

"Sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 18 April 1961, para diplomat yang ikut serta dalam unjuk rasa tidak sah telah dinyatakan sebagai personae non gratae. Mereka harus meninggalkan

Rusia secepat mungkin," kata kementerian itu.

Menurut kementerian, seperti dilansir Tass pada Minggu (7/2), Duta Besar Swedia, Polandia, dan Jerman telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Rusia pada atas insiden ini.

"Pihak Rusia mengharapkan bahwa misi diplomatik Swedia, Polandia, dan Jerman serta personanya akan secara ketat mematuhi hukum internasional," kementerian itu menekankan. Baca juga: Biden Pamer Otot Kebijakan Luar Negeri: Amerika Kembali

Rusia sendiri diketahui menangkap ribuan demonstran, yang menuntut pembebasan Navalny tersebut. Moskow mengatakan demonstrasi itu tidak sah, karena tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang. ● gul



AKSI CHAKKA JAM PETANI INDIA

Sejumlah petani ambil bagian dalam "chakka jam" tiga jam atau blokade jalan, sebagai bentuk protes terhadap UU Pertanian di pinggiran New Delhi, India, Sabtu (6/2).

Protes Kudeta Myanmar, Puluhan Ribu Orang Kembali Turun di Jalan

Demo Myanmar kali ini disebut Terbesar Sejak 2007. Sekitar puluhan ribu orang menyemut pada aksi unjuk rasa di Yangon, Myanmar, Minggu (7/2).

YANGON(IM)- Sekira puluhan ribu orang menyemut pada hari kedua unjuk rasa di Yangon, kota terbesar Myanmar, pada Minggu (7/2) waktu setempat. Ribuan lainnya juga melakukan aksi protes di seluruh negeri menuntut pembatalan kudeta militer dan penahanan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Protes ini disebut demonstrasi terbesar di negara Myanmar sejak Revolusi Saffron yang dipimpin biksu Buddha pada 2007. Meski, internet dan saluran telepon padam, para pengunjung rasa tetap mampu berkumpul menuntut pengambilalihan kekuasaan oleh junta.

Para pengunjung rasa di Yangon membawa balon-balon merah, warna yang mewakili Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi. "Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi!" demikian pekikan para pengunjung rasa.

Pada Sabtu (6/2), puluhan ribu orang turun ke jalan dalam protes massal pertama sejak kudeta Senin (1/2). Kemudian Minggu (7/2) pagi ini, kerumunan, diperkirakan lebih besar dari kemarin, datang dari seluruh penjuru Yangon berkumpul di kota praja Hledan. Beberapa orang berjalan melewati lalu lintas yang

macet dan berbaris di bawah sinar matahari yang cerah di tengah jalan.

Mereka mengibarkan bendera NLD dan memberi hormat tiga jari yang merupakan simbol protes terhadap kudeta. Pengeemudi membunyikan klakson dan penumpang mengangkat foto pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Suu Kyi.

Gambaran unjuk rasa yang tampak dalam siaran Facebook tersebut beberapa dari sedikit yang telah keluar dari negara itu sejak junta menutup internet dan membatasi saluran telepon pada Sabtu. Berbicara ketika dia mengambil video di jalan, penyiar mengatakan, mendapatkan informasi mungkin membantu menjaga keamanan para pengunjung rasa.

Tidak ada komentar dari junta di ibu kota Naypyitaw, lebih dari 350 km (220 mil) utara Yangon. "Mereka sudah mulai mematai internet, jika mereka lebih berkuasa, mereka akan lebih menekan pada pendidikan, bisnis, dan kesehatan," kata Thu Thu (57 tahun) yang ditangkap oleh junta sebelumnya selama protes pro-demokrasi di akhir 1980-an. "Inilah mengapa kami harus melakukan ini," katanya.

Seorang pria lain juga mengatakan, tidak dapat menerima ku-

deta ini. "Ini untuk masa depan kita. Kita harus keluar," kata seorang pria berusia 22 tahun yang melakukan unjuk rasa bersama 10 temannya, dan menolak menyebutkan identitas karena alasan keamanan.

Pada Minggu siang, sekitar 100 orang turun ke jalan dengan sepeda motor di kota pesisir Mawlamyine di tenggara. Sementara mahasiswa serta dokter berkumpul di kota Mandalay di Myanmar tengah.

Ratusan kerumunan lainnya bermalam di luar kantor polisi di kota Payathonzu di negara bagian Karen di tenggara, tempat anggota parlemen NLD diyakini telah ditangkap. Mereka tetap di luar di pagi hari, menyanyikan lagu-lagu pro-demokrasi.

Tanpa internet dan informasi resmi, desas-desus tentang nasib Suu Kyi dan kabinetnya mengemuka. Sebuah cerita bahwa Suu Kyi telah dibebaskan muncul, hal itu menarik banyak orang turun ke jalan untuk merayakannya pada Sabtu malam. Namun kabar itu dengan cepat dibatalkan oleh pengacaranya.

Thomas Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan, lebih dari 160 orang telah ditangkap sejak militer merebut kekuasaan. "Para jenderal sekarang berusaha untuk melumpuhkan gerakan perlawanan warga, dan menjaga dunia luar dalam kegelapan dengan memotong hampir semua akses internet," kata Andrews dalam sebuah pernyataan pada Ahad.

"Kita semua harus mendukung rakyat Myanmar di saat-saat

bahaya dan membutuhkan. Mereka layak mendapatkan apa pun."

Sebelumnya, penguasa militer Myanmar telah menutup akses internet, ketika ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa terbesar menentang kudeta, pada Sabtu (6/2).

"Pemadaman internet nyaris total dengan konektivitas turun ke 16% dari tingkat biasa," ujar kelompok pemantau NetBlocks Internet Observatory.

Di kota terbesar, Yangon, kerumunan orang menggelar unjuk rasa dan meneriakkan "diktator militer, gagal, gagal! Demokrasi, menang, menang!"

Polisi anti huru hara, yang dilengkapi perisai, telah memblokir jalan utama menuju pusat kota. Penutupan akses internet terjadi beberapa jam setelah penguasa militer menutup akses ke Twitter, dan Instagram untuk memblokir ajakan untuk menggelar aksi protes. Facebook telah diblokir sehari sebelumnya.

Banyak para pengguna internet menyalasi pembatasan di media sosial dengan menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), tetapi penutupan akses internet telah mengganggu upaya tersebut.

Organisasi masyarakat sipil mendesak penyedia internet dan jaringan seluler untuk menentang perintah pemblokiran tersebut, seperti dilaporkan kantor berita Reuters. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyebut penutupan itu "keji dan sembrono".

Penguasa militer Myanmar belum berkomentar atas kebijakan pemblokiran akses ke internet.

Sementara itu, ratusan anggota Parlemen Myanmar menegaskan menolak pemerintahan junta militer, yang mengambil alih kekuasaan pada awal pekan lalu. Setidaknya terdapat 300 anggota Parlemen Myanmar yang menyatakan penolakan itu.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah ke Facebook, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (7/2), para anggota parlemen ini menegaskan mereka adalah perwakilan masyarakat.

Para anggota Parlemen Myanmar ini kemudian bersumpah untuk terus memperjuangkan demokrasi atas nama konstituen.

Terkait situasi Myanmar, sebelumnya seorang mantan sekutu Aung San Suu Kyim membantah telah berkhianat karena menerima jabatan menteri dari junta militer.

Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar, The The Khine mengatakan, pemerintah militer yang baru inklusif dan berkomitmen terhadap demokrasi. Hal itu diungkapkannya dalam salah satu wawancara pertama yang diberikan oleh setiap anggota pemerintah baru sejak kudeta pada hari Senin lalu.

"Fakta angkatan bersenjata mengatakan mereka akan terus bertindak sesuai hukum, kami harus menyambungnya dengan senang hati. Saya tidak mengkhianati negara," ujarnya. ● tom

Perpanjangan New START Tanda Bahwa Pemerintah AS Siap Kurangi Resiko Nuklir

WASHINGTON (IM) - Perjanjian antara Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Presiden Rusia, Vladimir Putin tentang perpanjangan perjanjian New START menandakan kesiapan pemerintah AS untuk mengurangi risiko nuklir. Hal itu diungkapkan organisasi nirlaba, Nuclear Threat Initiative (NTI) yang berbasis di Washington.

"Kami menyambut baik berita bahwa Biden dan Putin telah mengkonfirmasi kesepakatan mereka untuk memperpanjang New START selama lima tahun, sementara juga mengakui berbagai masalah dalam agenda bilateral," kata Wakil Presiden NTI, Lynn Rusten.

Menurut Ketua Bersama Dewan NTI, Ernest J. Moniz dan Sam Nunn, langkah ini penting akan mencegah berakhirnya perjanjian pada 5 Februari dan mengirimkan sinyal yang jelas dari komitmen pemerintah Biden untuk mengambil langkah praktis guna memperkuat keamanan nasional AS dan mengurangi risiko nuklir.

"Memperpanjang New START memberikan landasan penting untuk membangun kembali kendali senjata global arsitektur untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir," ujarnya, seperti dilansir Tass.

Hal senada juga disampaikan Center for Arms Control and Non-Proliferation yang berbasis di Washington. Organisasi itu menyebut perpanjangan New START adalah keputusan yang tepat.

"Memperpanjang New START selama lima tahun penuh yang diizinkan berdasarkan persyaratan perjanjian adalah keputusan yang tepat. New START

baru telah secara efektif mengurangi dua persenjataan nuklir terbesar di dunia dan memungkinkan transparansi yang sangat dibutuhkan antara Amerika Serikat dan Rusia," ujarnya.

"Setiap New START berlaku di hari lain, kami menghindari penyebaran senjata nuklir tanpa batasan. New START baru sangat penting bagi keamanan nasional AS dan jelas bahwa pemerintahan Biden memahami hal itu. Perpanjangan ini juga akan memberi AS dan Rusia waktu untuk melanjutkan perjanjian pengendalian senjata," sambungnya.

New START adalah perjanjian besar terakhir dari jenisnya antara Rusia dan AS setelah Washington pada 2019 atau di era Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian kontrol senjata nuklir lainnya dengan Rusia yang dikenal sebagai Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF).

Perjanjian penting itu pertama kali ditandatangani untuk jangka waktu 10 tahun oleh mantan Presiden AS, Barack Obama dan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev pada tahun 2010. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 5 Februari 2011.

Perjanjian tersebut membatasi jumlah senjata ofensif strategis yang dapat dimiliki kedua negara. Perjanjian itu membatasi masing-masing pihak tidak lebih dari 700 rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dikerahkan, rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam (SLBM) dan pembom berat; tidak lebih dari 1.550 hulu ledak pada ICBM yang dikerahkan, SLBM yang dikerahkan dan pembom berat untuk persenjataan nuklir, dan total 800 peluncur ICBM yang dikerahkan dan tidak dikerahkan, peluncur SLBM, dan pembom berat. ● gul

WHO: Jumlah Orang yang Divaksin Lebih Banyak Dari Total Kasus Covid-19

JENEWA (IM) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menuturkan bahwa Secara global, jumlah vaksinasi terhadap Covid-19 sekarang telah melampaui jumlah infeksi yang dilaporkan. Tetapi, WHO menyebut, tetapi lebih dari tiga perempat vaksinasi hanya ada di 10 negara.

"Di satu sisi, itu adalah kabar baik dan pencapaian luar biasa dalam jangka waktu yang singkat," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (7/2).

"Tapi, lebih dari 75 persen dari vaksinasi itu hanya di 10 negara yang menyumbang

hampir 60 persen dari PDB global. Sekitar 130 negara, dengan 2,5 miliar orang, belum mendaftarkan satu dosis pun," sambungnya. Baca juga: Lakukan Vaksinasi Covid-19, WHO Kerahkan Tim ke Suriah

Dia mengatakan semua pemerintah harus melindungi rakyat mereka dan bahwa beberapa negara telah memvaksinasi sebagian besar penduduk mereka yang berisiko lebih rendah terkena penyakit parah atau kematian.

"Tapi begitu negara-negara dengan vaksin telah memvaksinasi pekerja kesehatan mereka sendiri dan orang tua, cara

terbaik untuk melindungi penduduk mereka yang lain adalah dengan berbagi vaksin sehingga negara lain dapat melakukan hal yang sama," kata Tedros.

"Itu karena semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memvaksinasi mereka yang paling berisiko di mana-mana, semakin besar kesempatan kita memberikan virus untuk bermutasi dan menghindari vaksin," sambungnya.

Tedros kemudian mengingatkan bahwa kecuali dunia menekan penyebaran virus di seluruh tempat, maka dunia tidak akan bisa kembali ke keadaan normal. ● ans



KORBAN LEDAKAN DI KABUL

Aparat keamanan Afghan membawa jasad korban ledakan di Kabul, Afghanistan, Sabtu (6/2).

Hakim ICC Akan Selidiki Kejahatan Kemanusiaan di Palestina

GAZA (IM)- Para hakim di Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court atau ICC), pada hari Jumat 5 Februari 2021 memutuskan, bahwa lembaga itu memiliki yurisdiksi atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di wilayah Palestina, sehingga melampirkan jalan untuk kemungkinan penyelidikan kejahatan tersebut, meskipun pemerintah Israel menolaknya.

Keputusan ICC itu memicu reaksi segera dari Israel, yang bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksinya, sementara Otoritas Palestina menyambut baik keputusan itu.

Jaksa penuntut ICC, Fatou Bensouda mengatakan, sedang mempelajari keputusan itu dan akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya "lewat panduan ketat dari mandatnya yang independen dan tidak berpihak".

Hal menambahkan, kantornya akan mempertimbangkan apakah akan melakukan penuntutan atas kejahatan dan kejahatan perang yang serius ketika negara-negara yang terlibat dalam tindak kejahatan itu tidak bisa atau tidak mau melakukan hal itu.

Para hakim ICC mengatakan, keputusan mereka didasarkan pada fakta bahwa Palestina telah diberikan keanggotaan ke dalam traktat pendirian ICC, dan telah

mengajukan situasi yang terjadi di sana kepada pengadilan di Den Haag.

Hakim ICC juga mengatakan, bahwa keputusan yurisdiksi ICC tidak memiliki konsekuensi dalam menentukan status kenegaraan Palestina, yang belum pasti, maupun pembatasan nasionalnya.

"Yurisdiksi teritorial pengadilan ICC terkait dengan situasi di Palestina diperluas ke wilayah (Palestina) yang diduduki Israel sejak 1967, Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur," kata mereka.

Bensouda memperoleh temuan pada Desember 2019 bahwa "kejahatan perang telah atau sedang berlangsung di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza."

Dia menyebut Pasukan Pertahanan Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas sebagai kemungkinan pelaku "kejahatan perang" tersebut.

Dalam pernyataan resmi menanggapi keputusan ICC itu, Human Rights Watch (HRW) menyebut bahwa keputusan itu sangat penting, dan "akhirnya menawarkan kepada para korban kejahatan (perang) serius, suatu harapan bagi keadilan setelah setengah abad kekebalan/impunitas (dari pelakunya)," demikian kata Balkees Jarrah, Direktur HRW untuk keadilan internasional. ● gul



AKSI MENENTANG KUDETA MILITER DI MYANMAR

Seorang pria mengambil gambar grafiti oleh seniman Thailand Mue Bon yang menentang kudeta militer di Myanmar di sebuah jalan di Bangkok, Thailand, Sabtu (6/2).